

MASA POLITIK KONSERVATIF KE POLITIK LIBERAL: STUDI TENTANG KEDUDUKAN BUPATI JAWA ABAD XIX

Dewi Salindri*

Abstract: The Dutch colonial government adopted a conservative policy because it was economically profitable. The success was inseparable from the role of regent as traditional ruler having the ability to control rural communities. A shift from a conservative policy to liberal one did not change the conditions of the inhabitants and the role of regents was kept to support the success of the system. Their socio-economic position did not change although they became part of the colonial administration and subject to control and restriction.

Keywords : conservative policy, liberal policy, regent, Java

1. Pendahuluan

Kalau kita berbicara tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, maka kita mengenal bagaimana kedudukan para bupati mengalami perubahan secara politis. Hal ini disebabkan pada awal Abad XIX adalah abad transformasi dari bentuk kehidupan sosial tradisional kebentuk-bentuk kehidupan sosial modern. Perubahan sosial terjadi ketika kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda (selanjutnya disingkat PKB), sudah berbentuk lembaga politik yang legal, dilengkapi dengan organisasi yang disusun secara modern dan disertai pejabat-pejabat Eropa.

Pejabat-pejabat Eropa ini merupakan klas penguasa baru yang menjadi saingan dari penguasa tradisional termasuk para bupati. Akibatnya kedudukan klas penguasa tradisional terdesak, karena dahulu menjadi penguasa yang otonom berubah dan menjadi pegawai dalam hierarkhi PKB. Menurut Sartono Kartodirdjo klas penguasa tradisional yang pertama-tama merasakan hal ini

* Dosen Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember.